

B u l e t i n



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA



Jaring Aspirasi RUU KUHAP

**KETUA
Pemerintah
Wajib Laksanakan
Rekomendasi MBG**

**PARIPURNA
RUU Statistik
Sah Jadi Usul
Inisiatif DPR**

Nomor 1363/I/X/2025 Oktober 2025



9 772614 339005



Jaring Aspirasi RUU KUHAP



FOTO: HAL/UM

Komisi III DPR RI menyerap langsung masukan aparat penegak hukum terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat, Padang, Jumat (26/9/2025).

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengajak seluruh mitra kerja Komisi III untuk bersama-sama menggali cara agar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mampu menyelamatkan negara, baik dari sisi pendapatan, keuangan, maupun kemaslahatan masyarakat. “Ayo kita gali cara kita untuk membuat KUHP ini menyelamatkan negara kita. Menyelamatkan pendapatan negara, menyelamatkan keuangan negara, dan menyelamatkan kita semua,” tegas Hinca dalam kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Jumat (26/9).

Ia menekankan, pembahasan KUHP tidak sekadar membaca pasal-pasal, tetapi juga harus berangkat dari pengalaman yang telah dilalui selama lebih dari 40 tahun berlakunya KUHP. “Saya ingin mengajak (berdasarkan) pengalaman yang sudah kita lewati. Misalnya Ibu Kajati, Pak Gatot, Pak

Budi, semua punya pengalaman panjang dengan KUHP. Dari sana kita bisa lihat kelemahannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan narkoba yang menurutnya telah merugikan negara, termasuk kasus keterlibatan aparat dalam operasi di Malaysia.

“Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita. Jelas itu. Sikap politik kami jelas, jangan untuk narkoba. Kita enggak mau kalah,” ujar Hinca.

Selain narkoba, Hinca juga menyoroti praktik pertambangan ilegal yang dinilai merusak sumber daya alam sekaligus merugikan ekonomi negara. Ia menyebut, Indonesia memiliki 2.741 lokasi tambang ilegal yang melibatkan jutaan pekerja. “Nangkapin pendulang emas (ilegal) menurut saya bukan sekadar menyalahi hukum, tapi dosa itu lah. Karena itu KUHP harus bisa menjawab tantangan besar ini,” katanya.

Sebagai penutup, Hinca mendorong seluruh mitra Komisi III, baik Polri, Kejaksaan, maupun lembaga peradilan, untuk membentuk tim kajian reformasi KUHP secara serius. “Kalau kita hanya bicara pasal, koma, titik, hasilnya akan sia-sia. Ini adalah era emas kita untuk memperbaiki KUHP. Kalau bukan sekarang, mungkin harus menunggu 50 tahun lagi,” tutup Hinca. — **hal/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapannya



Pemerintah Wajib Laksanakan Rekomendasi MBG



Ketua DPR RI, Puan Maharani menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ketua DPR RI Puan mengungkap sejumlah isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Selain melaporkan kinerja legislasi dan penganggaran yang telah dilakukan DPR dalam masa sidang ini, Puan juga menyampaikan fungsi pengawasan DPR yang diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. “Antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi *online*, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi dan penanganan

bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah,” kata Puan.

Puan mengungkap, DPR juga melakukan pengawasan pada evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, dan pembentukan Satgas Judi *Online*. “(Kemudian) penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” sebutnya.

Dirinya pun mengingatkan agar pemerintah menindaklanjuti hasil dalam rapat-rapat kerja di DPR. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tegasnya.



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Purinho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmim Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



RUU Statistik Sah Jadi Usul Inisiatif DPR



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meminta persetujuan seluruh peserta rapat, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik telah ditetapkan menjadi RUU usul DPR RI. Delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di mana secara keseluruhan fraksi menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut.

“Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislatif (Baleg) DPR RI tentang Statistik dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang diikuti oleh persetujuan seluruh peserta rapat, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Sebagai informasi, delapan fraksi menekankan perlunya penguatan sistem statistik nasional agar lebih terintegrasi, adaptif terhadap teknologi baru seperti *Big Data*, dan menjamin kualitas serta kedaulatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Seluruh fraksi memandang bahwa perubahan atas UU No. 16 Tahun 1997 ini adalah langkah mendesak untuk menjawab tantangan era digital dan mengatasi masalah tumpang tindih data.

Sebagai contoh, Fraksi PDI-Perjuangan berpandangan bahwa statistik yang akurat dan terpercaya merupakan alat vital bagi pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tersedianya data yang andal akan membantu

pemerintah mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa karena data dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, serta aspek sosial lainnya.

Fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran yang didukung oleh pijakan data statistik yang terukur dan benar. RUU ini merupakan wujud peran strategis dalam pembaharuan dasar hukum statistik nasional yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan data saat ini. RUU ini dinilai penting untuk mengatasi masalah ketidakberlanjutan data, duplikasi, dan kurangnya transparansi. **bia/aha**



Sambut Babak UU BUMN Baru

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut revisi ini sebagai langkah penting untuk memastikan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Perbaikan tata kelola BUMN yang direalisasikan melalui RUU ini sangat relevan dan penting. BUMN bukan hanya harus menjadi entitas bisnis profesional dan menguntungkan, tetapi juga

harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar

Perbaikan tata kelola BUMN yang direalisasikan melalui RUU ini sangat relevan dan penting. BUMN bukan hanya harus menjadi entitas bisnis profesional dan menguntungkan, tetapi juga harus transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

Anggia saat membacakan pidato dalam rapat paripurna.

Salah satu poin krusial yang disampaikan ialah larangan rangkap jabatan bagi Menteri maupun Wakil Menteri sebagai direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMN. Dengan aturan ini, jelasnya, publik akan memperoleh jaminan keputusan strategis di BUMN tidak lagi dipengaruhi kepentingan politik atau konflik kepentingan.

Sebagai contoh, kebijakan harga BBM, tarif listrik, maupun investasi di sektor pangan akan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kementerian BUMN kini berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang hanya berperan sebagai regulator.

Perubahan ini, terangnya, dinilai penting agar fungsi pengawasan dan pengaturan dipisahkan dari bisnis, sehingga publik bisa berharap pada BUMN yang lebih profesional dan efisien, yang mana akan bekerja seperti perusahaan swasta besar namun tetap berorientasi pada pelayanan rakyat.

um/aha



Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan pidato laporan terkait RUU BUMN dalam rapat paripurna.



Scan QR untuk berita selengkapnya

Sah! UU Pariwisata Perkuat Bangsa Indonesia



FOTO: FHN/PDT

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat menyerahkan laporan terkait RUU Kepariwisata kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10/2009 tentang Kepariwisata (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco ini salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisata.

“Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisata dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco dalam rapat paripurna Kamis (2/10). Anggota Dewan yang hadir menyambut pernyataan tersebut dengan seruan

setuju, dilanjutkan oleh satu kali ketokan palu oleh Dasco.

Sebelumnya, dalam pembahasan tingkat I atau rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyetujui RUU Pariwisata untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, RUU ini merekonstruksi landasan filosofis kepariwisataan nasional. Jika sebelumnya pariwisata lebih dilihat sebagai pemanfaatan sumber daya, RUU ini memposisikan pariwisata sebagai instrument untuk membangun peradaban bangsa, memperkuat identitas nasional dan sebagai perwujudan hak asasi manusia untuk berwisata.

“RUU ini merupakan respons atas dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Terdapat kebutuhan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal”, tandasnya.

Disisi lain, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan setuju atas sejumlah perubahan substansi sekaligus memaparkan langkah yang akan dilakukan atas berbagai perubahan dimaksud. Kemenpar juga menyepakati penguatan sejumlah substansi lainnya seperti pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat lokal.

tn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat menyerahkan laporan terkait RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

DPR RI melalui Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi. Pengesahan ini menandai babak baru dalam penguatan kerjasama penegakan hukum lintas negara, khususnya terhadap tindak pidana transnasional.

Dalam agenda Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyampaikan laporan hasil pembicaraan Tingkat I terkait RUU tersebut.

“Setelah melalui pembahasan di Panja dan pengambilan Keputusan Tingkat I pada Raker dengan Menteri Hukum Menteri Luar Negeri, seluruh Fraksi dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi untuk diambil keputusan pada Tingkat II Sidang Paripurna,” ungkap Andreas Hugo Pareira di Ruang Rapat

Indonesia-Rusia Resmi Berantas Kejahatan Lintas Negara

Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Usai laporan Komisi XIII, Pimpinan Sidang meminta persetujuan kepada seluruh fraksi. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia–Rusia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad, yang dijawab serentak oleh segenap Anggota Dewan dengan kata “setuju”.

Lebih lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan perjanjian ini menjadi

perjanjian ekstradisi pertama antara Indonesia dan negara di kawasan Eropa, serta melengkapi instrumen hukum kerja sama pidana yang sebelumnya telah dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Indonesia–Rusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi Menteri Hukum mewakili Presiden RI menyatakan setuju Rancangan Undang Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi menjadi Undang-Undang. **pun/aha**



RRI Jaga Kedaulatan Negara di Perbatasan

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai institusi tersebut berperan penting sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan program-program strategis kepada masyarakat.

Menurutnya, lembaga penyiaran publik ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang benar terkait capaian maupun kebijakan pemerintah.

“Anggaran yang dialokasikan untuk RRI bersumber dari negara, sehingga lembaga ini harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, seperti program pangan, pembangunan 3 juta rumah tanpa BPHTP, insentif untuk UMKM, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp100 juta tanpa agunan, perlu diinformasikan secara maksimal kepada publik melalui RRI maupun LPP lainnya,” ujar Bambang Haryo kepada **Parlementaria** di Kantor LPP RRI Manado, Provinsi

Sulawesi Utara, Sabtu (4/10).

Lebih jauh, ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap keberadaan RRI di wilayah perbatasan, salah satunya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun infrastruktur transportasi di wilayah tersebut, seperti bandara dengan layanan penerbangan rutin dan kapal perintis.

Namun, menurutnya, infrastruktur penyiaran juga harus diperkuat agar masyarakat

perbatasan mendapatkan akses informasi yang memadai. “Direktur Utama RRI menyampaikan usulan pembangunan pemancar dengan kekuatan besar untuk memperluas jangkauan siaran. Saya menilai ini sangat penting, karena RRI di wilayah perbatasan bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan informasi. Dengan begitu, masyarakat di perbatasan tetap terhubung dengan program pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. — **pun/rdn**

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat Kunjungan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado.

Lembaga penyiaran publik ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang benar



FOTO: PUN/PDT

Perbatasan Berhak Jadi Pusat Ekonomi

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga,” ujar legislator yang biasa disapa Aher itu dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/10).

Aher juga mengingatkan agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan infrastruktur pendukung,

seperti akses jalan yang memadai. Menurutnya, PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung semata, tetapi harus menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti perlunya kejelasan cetak biru pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia mencontohkan Pelabuhan Sepatik yang sampai saat ini belum memiliki kepastian pengembangan.

“Pelabuhan Sepatik ini harus jelas arahnya, apakah mau dikembangkan jadi pelabuhan besar atau sekadar pelabuhan penyeberangan. Jangan sampai berhenti di wacana,” ungkap Azis.

Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai keberadaan PLBN di Kaltara harus dipastikan benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar simbol kedaulatan negara.

“PLBN jangan hanya jadi gedung yang enak dipandang, tetapi juga harus bisa mendorong aktivitas ekonomi di perbatasan.

Masalahnya, banyak akses jalan ke PLBN yang bahkan belum ada.

Bagaimana bisa berfungsi optimal kalau jalannya saja tidak tembus?” ujar Deddy. **aha**

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, saat mengikuti pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025).



FOTO: AHA/PDT

Awasi Integritas Hakim KY



FOTO: MRA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, saat Rapat Kerja dengan Komisi Yudisial (KY) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyoroti tiga isu krusial terkait independensi dan kualitas hakim di Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dengan Komisi Yudisial (KY) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Pertama, Benny mengungkapkan kerancuannya mengenai dualisme kewenangan pengawasan hakim antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). “Hakim pengawas di Mahkamah Agung punya kewenangan juga untuk menanggapi laporan-laporan masyarakat, KY juga punya kewenangan di situ,” ungkap Benny.

Ia kemudian mempertanyakan solusi yang ditawarkan untuk memperkuat KY ke depan jika terjadi perbedaan pandang antara KY dan hakim pengawas MA, serta meminta

batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kerja masing-masing institusi.

Kedua, Benny juga menyoroti adanya stagnasi dalam peningkatan kualitas pendidikan hakim dibandingkan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Ia membandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya yang terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara hakim di pengadilan cenderung stagnan hanya bergelar S1 hingga akhir masa jabatan.

Ia meminta hasil kajian Komisi Yudisial mengenai fenomena kualitas hakim ini. “Dari banyak berita yang kita lihat dibandingkan dengan institusi-institusi penegak hukum lain, hakim ini cenderung kurang aktif dalam meningkatkan pengetahuan. Sebutlah melanjutkan pendidikan ke S2, S3 dan seterusnya,” kritiknya.

Hakim pengawas di Mahkamah Agung punya kewenangan juga untuk menanggapi laporan-laporan masyarakat, KY juga punya kewenangan di situ

Isu terakhir yang dipertanyakan Politisi Fraksi Partai Golkar ini adalah jurang perbedaan yang sangat lebar pada indeks integritas hakim. Berdasarkan data yang disajikan, persepsi hakim sendiri terhadap integritas mereka memiliki skor yang tinggi, yakni 9,24. Namun, penilaian dari masyarakat jauh lebih rendah, yaitu di angka 6,87.

“Barangkali ini kami ingin juga dapat penjelasan kenapa ini kok jauh seperti itu. Kok persepsi masyarakat terhadap hakim ini masih rendah,” tegasnya. **— bia/aha**



Cegah Desa Masuk Kawasan Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto menyoroti masih banyaknya desa dan lahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berstatus kawasan hutan produksi, bahkan sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung. Hal ini disampaikan Bambang dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI terkait Penataan Kawasan Hutan di Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Selasa (30/9).

“Bahwa di Kalteng ini masih banyak desa dan lahan yang masuk kawasan hutan produksi. Bahkan ada yang masuk hutan lindung. Oleh karena itu, ini perlu diselesaikan, diberikan legalitas. Karena mereka tidak bisa berkembang kalau desa dan lahannya ini masih masuk kawasan hutan produksi,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, masyarakat kerap kesulitan mengakses data titik lokasi untuk melihat klarifikasi status kawasan melalui sistem teknologi laman resmi Tapal 21 yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan tersebut. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah agar memastikan data kawasan hutan lebih jelas dan dapat diakses. “Hari ini kami hadirkan Dirjen terkait, dan insyaallah kami akan kawal persoalan kawasan hutan ini,” ujar Bambang.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize yang menekankan pentingnya sinergi antar-instansi terkait. Menurutnya, inventarisasi kawasan hutan harus dilakukan secara terintegrasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian,

Masyarakat kerap kesulitan mengakses data titik lokasi untuk melihat klarifikasi status kawasan melalui sistem teknologi laman resmi Tapal 21 yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI terkait Penataan Kawasan Hutan di Desa Garung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Selasa (30/9/2025).

serta Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Itu perlu ada kerjasama. Supaya mana kawasan yang harus diinventarisir bisa jelas. Kalau misalnya kantor gubernur saja masuk kawasan hutan, tentu harus dikeluarkan. Lalu, di dalam kawasan hutan yang ada kehidupan masyarakat pun harus diatur. Jangan sampai mereka merasa tercekik oleh aturan,” jelas Edoardus. —tra/aha



FOTO: TRA/PDT



Salah Struktur Bangunan, Nyawa Jadi Taruhan

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjarmiko menyerukan agar tragedi ambruknya bangunan

Pondok Pesantren Al Khoziny dijadikan pelajaran nasional untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di Indonesia. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi nyawa santri yang menjadi korban akibat kesalahan struktur bangunan.

“Bangunan pendidikan adalah ruang kehidupan. Kalau ia runtuh karena salah perhitungan, itu bukan sekadar kecelakaan teknis, tapi tragedi kemanusiaan,” ujar Sudjarmiko dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Minggu (5/10).

Ia menilai, pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan memadai menunjukkan bahwa keselamatan belum menjadi prioritas dalam budaya konstruksi nasional. “Selama pembangunan masih dianggap cukup dengan niat baik tanpa didukung disiplin teknis, risiko tragedi seperti ini akan terus berulang,” katanya.

Sudjarmiko menekankan bahwa setiap bangunan yang gagal harus dianggap sebagai alarm keras agar dilakukan evaluasi menyeluruh.

Bangunan pendidikan adalah ruang kehidupan. Kalau ia runtuh karena salah perhitungan, itu bukan sekadar kecelakaan teknis, tapi tragedi kemanusiaan

“Setiap kesalahan struktur adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem kita, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, asosiasi profesi, maupun lembaga pendidikan, untuk menjadikan tragedi Al Khoziny sebagai momentum perubahan. “Jangan biarkan kejadian ini hanya jadi berita sesaat. Kita harus memastikan bahwa dari peristiwa ini lahir perubahan nyata,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas bangunan pesantren

seharusnya mencerminkan keseriusan bangsa dalam melindungi generasi muda. “Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat tumbuhnya masa depan bangsa. Karena itu, keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita semua,” tutup Sudjarmiko. — **rdn**

Anggota Komisi V DPR RI,
Sudjarmiko.



FOTO: OJI/PDT



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat RDP dengan Kemendag, PT RNI, PTPN III, Perum Bulog, dan 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi di DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memperingatkan bahwa

kebocoran distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi rumah tangga telah merusak keseimbangan industri dan memiskinkan petani tebu. Jika dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang tegas, ungkapnya, harga gula kristal putih lokal milik petani jatuh dan industri gula dalam negeri kesulitan menyerap hasil produksi.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Bulog, dan 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Pemerintah pun, lanjutnya, terpaksa menggelontorkan dana sebesar Rp1,5 triliun melalui BUMN pangan, ID Food, untuk menyerap

Evaluasi Total Regulasi Gula Impor

kelebihan stok gula petani yang tak terserap pasar. "Bertahun-tahun masalah ini tidak selesai-selesai. Akhirnya Presiden Prabowo harus intervensi langsung dengan dana triliunan untuk menyelamatkan petani tebu. Ini bukan hal kecil. Ini kerusakan sistemik yang dibiarkan terlalu lama," ujar Andre.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan kondisi ini semakin memperkuat argumen bahwa kebocoran gula impor rafinasi ke pasar konsumsi memiliki dampak berlapis berupa merusak harga, mematikan petani lokal, menekan industri pengolahan gula, dan pada akhirnya membebani keuangan

negara. Ia pun menegaskan bahwa seluruh pemegang izin impor wajib memberikan penjelasan secara transparan dan terbuka terkait distribusi mereka.

Menutup pernyataannya, tata niaga gula nasional harus dibenahi secara menyeluruh, mulai dari perizinan impor, pengawasan distribusi, hingga perlindungan terhadap petani dan industri nasional. "Kita tidak bisa lagi membiarkan segelintir perusahaan menikmati fasilitas impor sementara petani tebu terus merugi. Negara harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung rakyat," tegas Andre. [um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim bersama tim saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Infinite Studi Batam, Rabu (1/10/2025).

Batam Sukses Semai Industri Ekraf

Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan pada berbagai sektor pembangunan nasional, termasuk industri, riset, inovasi, energi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. Dalam era transformasi digital saat ini, kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan potensi kreatif berbasis teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan memperluas peluang kerja yang berkualitas.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan

yang pesat dibidang ekonomi kreatif. Berdasarkan berbagai laporan, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat signifikan, dengan subsektor film, animasi dan konten digital menjadi pilar penting yang terus berkembang.

“Keberhasilan karya-karya anak bangsa yang mampu menembus pasar internasional telah menegaskan bahwa Indonesia memiliki talenta dan kapasitas yang mampu bersaing secara global,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Infinite Studi Batam, Rabu (1/10).

Menurutnya, infinite studio Batam adalah contoh nyata keberhasilan ekosistem industri ekonomi kreatif di Kota Batam yang mampu menjangkau pasar internasional. Meski demikian, perjalanan penguatan industri film, animasi dan konten digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar.

Sebab itu, jelasnya, ketersediaan tenaga kerja kreatif yang memiliki kompetensi sesuai standar global masih perlu ditingkatkan. Pun, ia menilai perlu adanya program pelatihan dan sertifikasi yang lebih luas serta kemitraan yang lebih merata antara studio, perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk memastikan kualitas dan keseimbangan SDM.

“Akses pembiayaan dan insentif fiskal bagi industri film dan animasi lokal perlu diperkuat agar pelaku usaha dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan global,” tandasnya.

hal/rdn



Harus Ada Standar Konstruksi Lembaga Pendidikan Agama

Ambruknya bangunan mushola Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa, memunculkan sorotan serius dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq. Ia menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi peringatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah pusat maupun daerah, untuk hadir dalam pembangunan pesantren di Indonesia.

"Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama, harus bisa mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan," ujar Maman kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (2/10).

Ia menekankan, pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama, harus bisa mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan

pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu, kata Maman, kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.

"Karena santrinya bertambah, Ponpes melakukan pembangunan mandiri yang akhirnya ala kadarnya. Seperti tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya," ungkap legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

Untuk itu, Maman mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun pemberi bantuan teknis. Lebih jauh, Maman mengingatkan agar pengelola pesantren di seluruh Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan.

Menurutnya, infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren. "Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan agama seperti pesantren," tegas Politisi Fraksi PKB ini. **ssb/rdn**

Anggota
Komisi VIII
DPR RI,
Maman
Imanulhaq.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DOK/PDT

Desak Buat Payung Hukum MBG

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti lemahnya tata kelola dan absennya payung hukum yang kuat sebagai penyebab utama insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang mengikat, seperti Peraturan Presiden (Perpres), guna menjamin koordinasi lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah secara optimal.

“Tata kelola di sini yang memang betul-betul kurang kontrol, Pak, dan belum paripurna,” ujar Felly Runtuwene sepakat dengan usulan

rekan-rekan komisi IX lainnya agar program ini segera memiliki payung hukum setingkat undang-undang atau minimal Perpres saat mengikuti rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Ia juga secara khusus mengkritisi adanya penyederhanaan sertifikasi dan perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang justru berpotensi meloloskan penyedia makanan yang tidak memenuhi standar

kesehatan. “Di sini (Kementerian Kesehatan) disampaikan, setelah penyederhanaan tidak perlu memiliki nomor induk berusaha, tidak perlu sertifikat standar, bahkan verifikasi persyaratan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak perlu,” jelasnya.

Menurut Felly, kebijakan penyederhanaan izin ini merupakan suatu kesalahan fatal. “Ini satu kesalahan menurut saya. Kalau bicara kesehatan, ya mari kita melindungi. *Enggak* perlu, *enggak* mau tahu siapa, tapi kita sampaikan, ini yang seharusnya dilakukan. Kalau ini dilakukan, tidak terjadi seperti hari ini,” tegasnya.

Tambahnya, tanpa payung hukum yang mengikat dan jelas, implementasi program di daerah akan sulit dikontrol. Ia mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait melibatkan kepala daerah, seperti Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, dalam setiap tahapan program. ➡ **gal/aha**



FOTO: MAR/PDT

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin rapat terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jangan Abaikan Nasib Guru Madrasah Swasta

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan agar pemerintah serius memperhatikan nasib guru madrasah dan lembaga pendidikan swasta. Dirinya sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Dalam kesempatan itu, Habib Syarief menyoroti persoalan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN (*mandatory spending*)

yang belum sepenuhnya dirasakan guru madrasah dan sekolah swasta. Ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran tersebut selama ini juga terserap oleh berbagai lembaga di luar Kementerian Pendidikan.

"Dari Rp754 triliun yang 20 persen *mandatory spending* untuk lembaga pendidikan di luar Kementerian Pendidikan, jumlahnya ada 24 lembaga dan kementerian, itu hampir menyedot Rp103 triliun," jelasnya, Selasa (30/9).

Menurut legislator PKB tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus alokasi

bagi lembaga pendidikan di luar Kementerian Pendidikan merupakan langkah positif.

Namun ia menekankan pentingnya memastikan anggaran Rp103 triliun tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan guru swasta dan madrasah. "Hanya yang sedang kita coba perjuangkan, yang Rp103 triliun ini dikemanakan. Ini yang sedang kita kejar," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan DPR RI, baik melalui Komisi VIII maupun Komisi X, akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan swasta, termasuk melalui dorongan perbaikan kebijakan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

"20 persen itu termasuk APBD. Perhatian provinsi dan kabupaten pun sangat tidak jelas. Ini yang sedang kita coba kejar terus. Namun memang *political will* pemerintah tidak bisa sekaligus," pungkasnya.

hal/aha

Akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan swasta, termasuk melalui dorongan perbaikan kebijakan anggaran di tingkat pusat maupun daerah

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MUN/PDT



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haikal dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI terkait pengambilan keputusan RUU PPSK di Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haikal menyampaikan

DPR menargetkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dapat segera disahkan dalam masa sidang ini. "Ini target kita memang kita ingin selesaikan secepat mungkin karena memang undang-undang ini adalah undang-undang kumulatif terbuka, di mana berdasarkan putusan MK, peralihan dan perubahan ini harus dilakukan pada paling lambat dua tahun setelah putusan MK tersebut," ujar Haikal kepada **Parlementaria**, Rabu (1/10).

Ia menegaskan, setidaknya ada dua mandat utama dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dipenuhi. Pertama, menjaga independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga pembahasan anggaran lembaga tersebut tidak lagi dengan

RUU PPSK Perlu Diupayakan Selesai

Kementerian Keuangan, melainkan dengan DPR. Kedua, perubahan terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan, yang tidak lagi hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga melibatkan kepolisian.

"Kalau pembahasan anggarannya LPS dengan Kementerian Keuangan artinya dia masih di bawah tekanan daripada pemerintah. Sehingga itu independensinya tidak bisa digagal," jelasnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa RUU ini juga memuat beberapa penyempurnaan tambahan. Di antaranya, penambahan tujuan Bank Indonesia agar tidak hanya menjaga stabilitas. Lebih lanjut,

RUU ini turut mengakomodasi perkembangan aset digital, termasuk kripto, sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi masa depan.

Di sisi lain, DPR juga memperbaiki aturan jaminan kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya terbatas, sehingga kini korban kecelakaan tunggal atau penumpang di dalam kendaraan juga bisa mendapat perlindungan. "Prosesnya sekarang dari kita sudah selesai, proses politik di Senayan tinggal menunggu besok insya Allah. Nanti kita menunggu dari pemerintah untuk menyusun daftar inventaris masalah, kemudian dibahas lagi dengan kita untuk pembahasan akhir," pungkas Haikal.

hal/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Rampungkan RUU Migas Demi Hapus Inkonsistensi Regulasi

ini diterbitkan hanya bersandar pada surat edaran menteri atau keputusan ad-hoc yang rentan berubah sewaktu-waktu.

Hal ini, ungkapnya, membuat iklim investasi energi menjadi tidak pasti, dan pada akhirnya merugikan negara maupun masyarakat. “Kalau acuannya jelas, semua pihak bisa bekerja dengan tenang. Swasta bisa investasi dengan kepastian hukum, Pertamina bisa menjalankan



Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar dalam RDP Komisi XII DPR dengan Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah perusahaan swasta, di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait kebijakan energi yang dinilai tidak konsisten dan cenderung bersifat coba-coba. Ia menegaskan, inkonsistensi ini tidak hanya membingungkan investor dan pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Dulu kita punya program BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke. Itu sempat berhasil di masa Menteri Jonan, tapi tiba-tiba redup, hilang, dan diganti dengan

kebijakan lain yang juga tidak berkelanjutan. Seolah-olah kita memanajemen negara dengan coba-coba,” ujar Yulian dalam RDP Komisi XII DPR dengan Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah perusahaan swasta, di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu, akar masalah justru berada pada kelemahan regulasi. Sampai saat ini, Undang-Undang Migas yang menjadi fondasi hukum bagi kebijakan energi nasional belum kunjung dirampungkan. Ia menilai, kebijakan yang selama

tugasnya dengan stabil, dan masyarakat bisa mendapat layanan energi tanpa resah dengan kebijakan yang berubah-ubah,” lanjut Legislator Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan DPR segera menuntaskan pembahasan RUU Migas agar sektor energi memiliki payung hukum yang kuat dan jelas. “Kalau fondasi regulasi sudah ada, baru kita bisa bicara soal strategi dan program. Kalau tidak, kita hanya akan terus berputar pada polemik yang sama,” tutup Yulian.

fa/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jangan Ada *Stateless* bagi Anak Kawin Campur



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira.

Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta Kementerian Sekretariat Negara untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak yang berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dan hampir *stateless* akibat perkawinan campuran.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII dengan

Guna mempercepat proses, kami mendorong Kementerian Hukum untuk meningkatkan layanan digitalisasi dalam proses pewarganegaraan guna mencapai percepatan, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, serta Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) di Ruang Rapat Komisi XIII, Rabu (1/9).

Komisi XIII DPR juga mendukung Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) untuk segera menyampaikan data anak-anak *stateless* dan hampir *stateless* kepada kementerian terkait agar dokumen kewarganegaraan mereka dapat segera diselesaikan. Pihaknya, lanjut Andreas, akan mendorong Kementerian Imigrasi, Kementerian Hukum, dan Setneg untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menyelesaikan proses kewarganegaraan anak-anak tersebut.

“Dan guna mempercepat proses, kami mendorong Kementerian Hukum untuk meningkatkan layanan digitalisasi dalam proses pewarganegaraan guna mencapai percepatan, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik,” jelasnya.

Terakhir, Ia mendorong percepatan perubahan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia menyatakan komitmen bersama untuk memperbaiki masalah ini salah satunya dengan memperbaiki UU Nomor 12/2006. **hal/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



OECD Pacu Indonesia Kejar Standar Global

Kunjungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) turut menjadi momentum membahas peluang Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menekankan pentingnya aksesi ini bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan.

“Jadi saat ini Indonesia sedang dalam proses aksesi keanggotaan OECD. Apa untungnya apabila Indonesia bergabung dengan

OECD? Dengan bergabung dengan OECD kita akan mendapatkan peningkatan investasi dan peningkatan sinkronisasi standar dengan standar *good governance* secara global,” jelas Ravindra kepada **Parlementaria** usai pertemuan dengan Rektor dan akademisi UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/9).

Ia menambahkan bahwa aksesi OECD diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,8

persen pada periode 2028–2030 dan 0,9 persen setelah tahun 2030. Menurutnya, hal ini menjadi alasan penting mengapa parlemen berperan dalam sinkronisasi regulasi, khususnya pada sejumlah undang-undang strategis.

“Undang-undang terkait dengan undang-undang statistik, penguatan lembaga statistik nasional dan juga untuk undang-undang anti-*bribery of foreign officials*. Jadi dua ini adalah undang-undang yang disinkronisasikan. Ada beberapa undang-undang lagi namun utamanya adalah dua undang-undang ini,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Ravindra menekankan bahwa langkah tersebut akan memperkuat regulasi tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang peningkatan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*) bagi Indonesia. Dengan begitu, tegasnya, ruang pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin luas di masa mendatang. **uc/rdn**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga dalam Kunjungan BKSAP DPR RI ke UIII turut menjadi momentum membahas peluang Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).



FOTO : UCA/PDT



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Regulasi Masyarakat Hukum Adat Harus Komprehensif



FOTO: DEP/PT

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan dalam diskusi bersama para pakar dan kementerian terkait dalam rangka penyusunan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekkuinbangkesra) Badan Keahlian DPR RI menggelar diskusi bersama para pakar dan kementerian terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10), dipimpin oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan.

RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan usul inisiatif Anggota DPR RI, yang diajukan oleh Fraksi PKB, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Demokrat. Daniel Johan menegaskan pentingnya pengaturan komprehensif mengenai

masyarakat hukum adat, mengingat selama ini regulasi yang ada masih bersifat sektoral.

“Perundang-undangan yang ada masih dilakukan secara sektoral dan belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, kebutuhan hukum masyarakat hukum adat belum terpenuhi, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, pengaturan secara komprehensif dalam satu undang-undang sangat diperlukan,” ujar Daniel.

Ia menambahkan, masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan menjadi penting agar naskah akademik dan draf RUU yang disusun memenuhi prinsip partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful

participation). Sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi antara lain Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono.

Bayu dalam paparannya menekankan bahwa penyusunan RUU ini memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. “RUU ini sejatinya adalah undang-undang organik yang merupakan perintah langsung dari konstitusi. Selain itu, sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas pentingnya regulasi tentang masyarakat hukum adat, terutama terkait hutan adat, tanah ulayat, dan hak-hak komunal,” ungkap Bayu. **ssb/aha**





Komisi II DPR RI mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar segera melakukan koordinasi agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik supaya difungsikan sebagai jalur keluar-masuk resmi. Pernyataan ini disampaikan saat meninjau langsung kondisi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Sabtu (4/10/2025). Foto:





Podcast.

「SUDUT DENGAR PARLEMEN」



@TVRPARLEMEN



RADIO PARLEMEN



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri